TAJUK RENCANA

Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Seksual

MIRIS. Begitu pilu nasib yang harus dialami N, warga Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah. Setelah hilang selama sekitar 4 bulan, N diketemukan keluarganya di sebuah rumah di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhsekti masih di Kabupaten Pati. Kondisi bocah berusia 14 tahun tersebut sangat mengenaskan.

Selama hilang, siswa SMP tersebut diberitakan disekap dan menjadi budak seks. Kini mengalami kehamilan, dengan kondisi terpapar infeksi menular seksual (IMS) bahkan kekurangan gizi. Akibat penyekapan dan menjadi budak seks tersebut, N mengalami trauma berat dan kondisinya kritis. (KR, 5/8). Tragis, ketika diketemukan N sedang sendiri dan lelaki yang menyekap dan memerkosanya melarikan diri. (KR, 6/8)

Kasus ini spontan viral di media sosial. Keterkejutan masyarakat pun membuncah. Umpatan kejam dan biadabnya pelaku, spontan terlontar. Direktur LBH Advokasi Nasional Maskuri Alfathy menyatakan tindakan pelaku penyekapan terhadap N dikategorikan biadab. Pelakunya bisa dikenakan hukuman mati. Beberapa tokoh masyarakat pun mengungkap pernyataan serupa.

Sungguh memrihatinkan. Inilah fakta bila kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual, tidak pernah surut kejadiannya. Biasanya, anak yang menjadi korban enggan melapor kasus yang dialami. Keluarga pun menutup aib. Apalagi mayoritas pelaku adalah orang dekat korban. Mulai ayah, saudara lelaki, kakek atau paman bahkan tetangga juga guru. Padahal dampaknya bisa panjang.

Dampak itu disebut Ivo Noviana (ejurnal.kemsos.go.id, 24/8/2015) antara lain, hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*). Kemudian trauma secara seksual (*traumatic sexualization*), merasa tidak berdaya (*powerlessness*) dan stigma (*stigmatization*). Kian memiriskan, secara psikhis bahkan bisa menimbulkan ketagihan, trauma, atau pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial luas di masyarakat.

Ini adalah 'PR' besar bangsa ini. Tragisnya, meski merupakan fenomena gunung es, angka kasus kekerasan terhadap anak selalu tinggi. Data tercatat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama 2021 terdapat 5.953 kasus, dengan 2.982 kasus perlindungan khusus anak. Dari 2.982 kasus perlindungan khusus anak tersebut, 859 di antaranya masalah kekerasan seksual. Secara rinci, korban kekerasan seksual perkosaan 285 kasus, korban kekerasan seksual sesama jenis 9 kasus, korban kekerasan seksual 230 dan anak korban pencabulan 306 serta anak korban pencabulan sesama jenis 29 kasus.

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini masih saja terjadi dan sudah sangat mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan ini merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka tindak tegas pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus dilakukan. Selain tentu, lingkungan juga harus diakui memiliki kepedulian besar untuk mengurangi terjadinya kejahatan seksual.

Undang-undang Perlindungan Anak yang sudah diamanademan beberapa kalui memberikan sudah sanksi berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Hal itu tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Tentu juga untuk memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan kejahatannya, apalagi mengulangi kejahatannya. ❑

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pelanggaran Marka Jalan

SAAT ini arus lalulintas di Yogyakarta makin padat dan cenderung ruwet. Makin banyaknya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat di jalan raya, namun tak diikuti dengan kesadaran tertib lalulintas . Akibatnya, tampak di hampir di semua simpang empat, terjadi kemacetan.

Hal ini dikarenakan banyak pemakai jalan melanggar marka jalan. Akibatnya pengguna jalan yang akan belok kiri terhambat pengguna jalan yang akan terus namun memakai jalur belok kiri. Begitu pula banyaknya mobil yang lebih memilih jalur lambat di jalan lingkar atau ringroad menyebabkan kemacetan di jalur lambat yang merugikan dan mengambil hak sepedamotor.

Saya mengharapkan ada petugas polisi lalulintas yang rutin menjaga semua persimpangan jalan. Terima kasih

***) Valencia,** *Gamping Yogyakarta*

Muhasabah Bangsa untuk 17 Agustus

HAMPIR 77 tahun Ir Soekarno dan Drs Mochammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia telah mengguangkan Proklamasi Kemerdekaan RI. Memproklamirkan Kemerdekaan RI dan disambut di seluruh wilayah Indonesia hingga kemerdekannya diakui bangsa-bangsa lain di dunia. Kini, perjuangan para syuhada yang rela berkalang tanah mengurbankan harta dan nyawa, perjuangan dan keberanian Soekarno ñ Hatta dengan dukungan sekelompok orang di belakangnya, harus kita hormati, harus kita apresiasi dan harus kita kenang selalu.

Ayolah, mari dalam memeringati dan mengenang Proklamasi Kemerdekaan RI kita tidak sekadarnya. Mari kita berefleksi apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa ini. Sudah sesuaikah pengabdian pada bangsa dan negara selama ini? Selain itu kita harus mendoakan arwah para syuhada dan juga Soekarno-Hatta agar mereka mendapat karunia Allah atas amal ibadahnya. Berada di tempat yang terbaik di sisiNya. Sebagaimana firman Allah : *Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rejeki.* (AQ, Ali Imran 169). ❑

) Bambang Syariwan Setiawan,
Pleret Wates Kulonprogo

Perkuat Data Kemiskinan DIY

Anif Muchlashin

KEMISKINAN di Provinsi DIY masih menjadi isu menarik yang belum selesai pembahasannya. Pasalnya, terdapat beberapa ketimpangan dari pencapaian-pencapaian lain. Misal Indeks Pembangunan Manusia DIY berstatus ísangat tinggií yakni berada di angka 80,22 tahun 2021. Bahkan di Kota Yogyakarta berada di kota tertinggi di Indonesia dengan angka capaian 87,18% (BPS, 2021). Indeks Pembangunan Manusia mengukur tentang dimensi umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Selain itu pencapaian lain tentang opini BPK selalu WTP dan nilai akuntabilitas pemerintah (Akip) selalu mendapatkan nilai terbaik (AA).

Namun, tingkat kemiskinan di DIY masih tergolong tinggi. Berada di atas tingkat nasional. Meskipun secara persentase grafiknya selalu menurun. Hanya saat pandemi Covid-19 sedikit naik dari 11,44 bulan September 2019 naik pada bulan Maret 2020 menjadi 12,28%. Tetapi Maret 2022 kembali menunjukan penurunan yakni berada di titik 11,34%. Kemiskinan di DIY akhirnya menjadi banyak sorotan dan menjadi aspek bahasan yang harapannya dapat menurun secara cepat.

KR-JOKO SANTOSO

DTKS

Dalam rangka penurunan kemiskinan DIY juga memiliki PR untuk menurunkan kemiskinan esktrem hingga tingkat 0 di tahun 2024. Tahun 2022 kemiskinan ekstrem memiliki sasaran 4 kabupaten di DIY yakni Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul dan Sleman dengan persentase 6,20% dengan total sasaran 244,280. Sampai saat ini terdapat intervensi sebanyak 349.758 dalam bantuan pangan non- tunai (BPNT) dan 187.584 melalui bantuan keluarga harapan (PKH) di DIY.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan satu data untuk penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DTKS yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. DTKS saat ini sudah menggunakan perspektif dari bawah. Masyarakat miskin dapat melakukan pendaftaran setiap bulannya melalui aplikasi SIKN-G (Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation) yang keberadaannya sudah dapat diakses melalui kelurahan atau kalurahan.

DTKS yang sudah dimasukkan nanti akan dikelola Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kementerian Sosial RI yang nantinya akan menentukan target yang akan menerima bantuan sosial. Baik bantuan sosial berupa PKH, BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BPNT PPKM) dan Penerima Bantuan Indonesia (PBI).

Kurang Menggambarkan

Berdasarkan monev di lapangan bantuan sosial kini menjadi idola di masyarakat. Data kemiskinan di DIY berdasarkan BPS pada periode September 2021 sebesar 11,91% dengan total penduduk 474,49 ribu orang, namun berdasarkan data dari DTKS per 10 Februari 2022 sebanyak 2.026.350 dari total penduduk 3.668.719 di DIY.

Ini berarti sepertiga lebih penduduk DIY masuk dalam data DTKS. Namun dari total masyarakat yang masuk ke DTKS, data penerima bantuan sosial tidak sebanyak tersebut. Data di Kulonprogo penerima BPNT dan PKH sebanyak 26.626 penerima, Bantul 45.610 penerima, Gunungkidul 47.890 penerima, Sleman 35.537 penerima, dan Kota Yogyakarta 9121 penerima. Total penerima BPNT dan PKH di DIY sebanyak 164.784.

DTKS saat ini kurang menggambarkan kemiskinan BPS sejumlah 11,34%. Saat ini DTKS menunjukan 60% penduduk masuk pada sasaran kemiskinan. DTKS per 2020 tidak memiliki peningkatan sebagai sasaran yang tepat. Maka melalui tulisan ini penulis merekomendasikan perlunya sasaran data kemiskinan yang lebih tepat sasaran. ❑

) Anif Muchlashin,
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bappeda DIY

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Menilik Seragam Berjilbab di Sekolah

Samsuri Nugroho

ISU seragam sekolah khususnya atribut jilbab mencuat lagi dalam jagat media sosial maupun media cetak. Terlebih setelah adanya peristiwa di salah satu SMA Negeri di Bantul yang diduga memaksa salah peserta didik perempuan untuk menggunakan jilbab. Sontak kabar tentang peristiwa ini melahirkan pergunjingan public. Apalagi kepala sekolah beserta tiga guru untuk sementara dibebastugaskan dari jabatannya. Proses investigasi hingga saat ini masih terus berlangsung untuk mencari duduk persoalan yang sebenarnya terjadi. Gubernur DIY Sri Sutan Hamengku Buwono X telah mengambil langkah cepat dengan harapan peristiwa serupa tidak terjadi lagi di wilayah DIY dan daerah lainnya di Indonesia.

Seragam sekolah di Indonesia, khususnya pada sekolah negeri memang sangat berpotensi melahirkan permasalahan dalam berbagai hal. Keinginan sekolah agar bisa tampil berwibawa dan berkelas salah satunya adalah penggunaan seragam yang rapih, santun dan indah dipandang. Kondisi ideal seragam seperti itu memang layak dicitakan sebuah sekolah. Warga sekolah atau orangtua siswa akan merasa bangga jika kondisi seperti itu dimiiliki almamaternya.

Pemaksaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi sekolah negeri telah dengan jelas mengatur bagaimana seragam sekolah seharusnya dilaksanakan. Dalam melaksanakan peraturan ini telah diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama) yang menitikberatkan pada kebebasan peserta didik untuk memakai seragam sekolah sesuai agama dan keyakinannya. Dalam konteks ini tidak boleh adanya pemaksaan dan larangan. Keduanya harus hadir secara seimbang dalam sebuah sekolah.

Memaksakan peserta didik perempuan Islam untuk berjilbab pun dilarang apalagi bagi yang bukan Islam. Sebaliknya sekalipun dalam lingkungan mayoritas bukan muslim, tidak seorang pun yang dapat menghalangi peserta didik perempuan untuk tidak boleh menggunakan jilbab. Peraturan ini sesesungguhnya sudah sangat jelas untuk diikuti dan dipatuhi pihak sekolah. Permasalahan pelanggaran atas peraturan ini yang paling sering didengar adalah kasus yang berkaitan dengan pemaksaan berjilbab. Sedang permasalahan kasus pelarangan berjilbab bagi peserta didik perempuan hampir tidak pernah terdengar sekalipun pernah ada namun tidak seheboh jika ada kasus pemaksaan berjilbab.

Kepiawaian Pendidik

Tujuan Pendidikan Nasional antara lain untuk menjadikan peserta didik bertakwa kepada Tuhan Yangg Maha Esa berbudi pekerti luhur. Namun dalam pelaksanaannya tidak boleh ada pemaksaan khususnya berkaitan dengan sergam identitas keagamaan. Islam yang sumber ajarannya bersumber dari Alquran dan hadist memang telah mengisyaratkan bahkan mewajibkan setiap perempuan dewasa untuk menutup auratnya meliputi rambut dan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan (Al Ahzab 59).

Berangkat dari ayat inilah para pendidik muslim berniat baik untuk melaksanakan perintahNya dengan cara mewajibkan peserta didik perempuan untuk berjilbab. Penulis yakin tidak ada satu niatan jahat berupa hasrat intoleran dan radikal yang dilakukan kecuali berniat kebaikan menjalankan firmanNya. Namun sayang, jika langkah yang diambilnya berupa pemaksaan maka hal ini merupakan bentuk pelanggaran peraturan pemerintah.

Di sinilah dituntut sebuah kepiawaian pendidik membuka hati dan kesadaran peserta didik perempuan untuk mengerti dan sadar, bahwa berjilbab itu wajib. Niscaya jika ini disadari untuk dijalankan semua komponen pendidikan, tidak lagi menjadi sebuah problem. Kegaduhan yang pernah ada semoga tidak terulang dan juga tidak terus menerus dijadikan ihwal para pejuang pengikis intoleransi. ❑

) Samsuri Nugroho,
Anggota Dewan Pakar PGRI DIY.

Pojok KR

Indonesia juara umum ASEAN Para Games 2022.

-- Luar biasa, kami bangga padamu.

***

BMKG peringatkan gelombang setinggi 6M di Selatan Jateng.

-- Semua harus waspada.

***

Ribuan keluarga di Banyumas alami kemiskinan ekstrem.

-- Mas Ganjar, ini perlu perhatiannya...

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd, Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.